

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

**SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL KAS PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDALITBANG) PROVINSI RIAU**

*Disusun dan Dianjurkan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan
Tugas-Tugas Akademika dan Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

CHELSE NIZARA O.K
01770423562

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : CHELSI NIZARA O.K
 NIM : 01770423562
 PROGRAM STUDI : DIPLOMA III AKUNTANSI
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL : **SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL KAS PADA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 (BAPPEDALITBANG) PROVINSI RIAU**

Setelah kami teliti dan memberikan bimbingan sebagaimana mestinya, maka kami berpendapat bahwa tugas akhir ini di setujui.

Pekanbaru, 30 April 2020


DISETUJUI OLEH Pembimbing


Riniel, SE, MM, CA
 NIP. 130 707 014

MENGETAHUI,

DEKAN

KETUA JURUSAN


Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003


Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
 NIP. 19741108 200003 2 004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : CHELSI NIZARA O.K
 NIM : 01770423562
 JURUSAN : DIPLOMA III AKUNTANSI
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL : **SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL KAS PADA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 (BAPPEDALITBANG) PROVINSI RIAU**
 HARI/TANGGAL : Selasa, 19 Mei 2020

DISAHKAN OLEH
TIM PENGUJI

KETUA PENGUJI

Prof. Dr. Lenv Nofianti, MS, SE, M.Si, AK, CA
 NIP. 19751112 199903 2 001

PENGUJI I

Febri Rahmi, SE, M. Sc., Ak, CA
 NIP. 19720209 200604 2 002

PENGUJI II

Identiti, SE, M. Ak, Ak, CA
 NIP. 19690623 200901 2 004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL KAS PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG) PROVINSI RIAU**

Oleh : CHELSEI NIZARA O.K

01770423562

Kas merupakan harta yang paling lancar (liquid) yang paling mudah disembunyikan atau di hilangkan. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal kas perlu di susun dengan cermat, berhati-hati dan lengkap agar tidak terjadi kecurangan dan penyelewengan. Penelitian ini di lakukan di badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan (BAPPEDALITBANG) Provinsi Riau. Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa sistem pengendalian internal kas yang diterapkan pada BAPPEDALITBANG Provinsi Riau. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu mengumpulkan, mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal kas telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada. Sistem penerimaan dan pengeluaran kas di tinjau langsung oleh Pimpinan dan setiap transaksi pengeluaran kas di otorisasi oleh pihak yang berwenang. Sistem pengendalian internal kas di BAPPEDALITBANG pun telah sesuai dengan unsur-unsur pengendalian internal menurut PP No.60 tahun 2008.

Kata kunci : Kas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau, Sistem pengendalian internal

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur saya ucapkan Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah dan Ridha yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Sistem Pengendalian Internal Kas Pada Badan Perencanaan Pembangunan daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau “ . Shalawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beserta sahabat dan keluarganya, yang telah membawa kita ke zaman yang terang benderang yang disinari cahaya Iman dan Islam. Penulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau. Selama proses menyelesaikan Tugas akhir ini penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk itu dari hati yang paling dalam penulis menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada para pihak yang berperan dalam penyusunan ini antara lain :

1. Bapak Prof, Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau beserta staf.
2. Kepada Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepada Ibu Faiza Muklis, SE, MSi, Ak selaku Ketua Jurusan D3 Akuntansi Fakultas ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
4. Kepada Ibu Febri Rahmi, SE, MSc., Ak selaku Sekretaris Jurusan D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
5. Kepada Ibu Rimet, SE, MM, Ak selaku pembimbing Akademis yang dengan ramah, penuh kesabaran, dan kebijaksanaan telah memberikan bimbingan, arahan dan dorongan di sela-sela kesibukannya.
6. Kepada Kepala Badan dan seluruh pegawai BAPPEDALITBANG Provinsi Riau yang senantiasa membantu kelancaran dalam penulisan Tugas Akhir ini dan memberikan bimbingan sehingga penulis dapat mengumpulkan data dengan baik dan benar.
7. Ayahanda O.K Nirwana Jamil dan Ibunda Ratna Wilis tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan moril, materil, dan do'a kepada penulis serta selalu menjadi motivasi utama dalam hidup. Tidak lupa juga untuk adikku tersayang O.K.M Abiyyi cendikia yang selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Seluruh Keluarga Besar saya yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik.
9. Sahabat seperjuangan Dhea Rezky, Putry Sundary, Vegi amara, Dianah Sabilah yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Serta semua teman – teman dan mahasiwa/i DIII Akuntansi yang telah membantu dan mengingatkan penulis dalam menyelesaikan dan menyusun Tugas Akhir ini yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Dan sebagai insan yang memiliki keterbatasan serta kekurangan, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan dan penulisannya. Untuk itu, penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan Tugas Akhir selanjutnya. Namun penulis tetap sangat berharap bahwa Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, April 2020

CHELSE NIZARA O.K

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan manfaat Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Penelitian	4
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Lokasi Penelitian	5
1.4.2 Waktu Penelitian	5
1.4.3 Jenis dan Sumber data Penelitian	5
1.5 Metode Pengumpulan Data	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM BAPPEDALITBANG PROVINSI RIAU	
2.1 Sejarah Singkat	8
2.2 Visi dan Misi	10
2.3 Tugas dan Fungsi	11
2.4 Struktur Organisasi	14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

2.5 Uraian Tugas.....	15
-----------------------	----

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

3.1 Tinjauan Teori.....	37
3.1.1 Pengertian akuntansi.....	37
3.1.2 Kas	38
3.1.3. Jenis-jenis kas	40
3.1.4 Sistem pengendalian internal	40
3.1.5 Unsur-unsur pengendalian	44
3.1.6 Pengendalian internal Kas	48
3.1.7 Sistem Akuntansi Penerimaan & Pengeluaran Kas.....	51
3.1.8 Pengendalian internal menurut perspektif islam	53
3.2 Tinjauan Praktek	55
3.2.1 Sumber Kas di BAPPEDALITBANG	55
3.2.2 Jenis Penerimaan Kas di BAPPEDALITBANG	56
3.2.3 Jenis Pengeluaran Kas di BAPPEDALITBANG	57
3.2.4 Deskripsi Sistem Penerimaan Kas BAPPEDALITBANG	58
3.2.5 Deskripsi Sistem Pengeluaran Kas BAPPEDALITBANG	60
3.2.6 Sistem Pengendalian Internal Kas BAPPEDALITBANG	66

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	72
----------------------	----



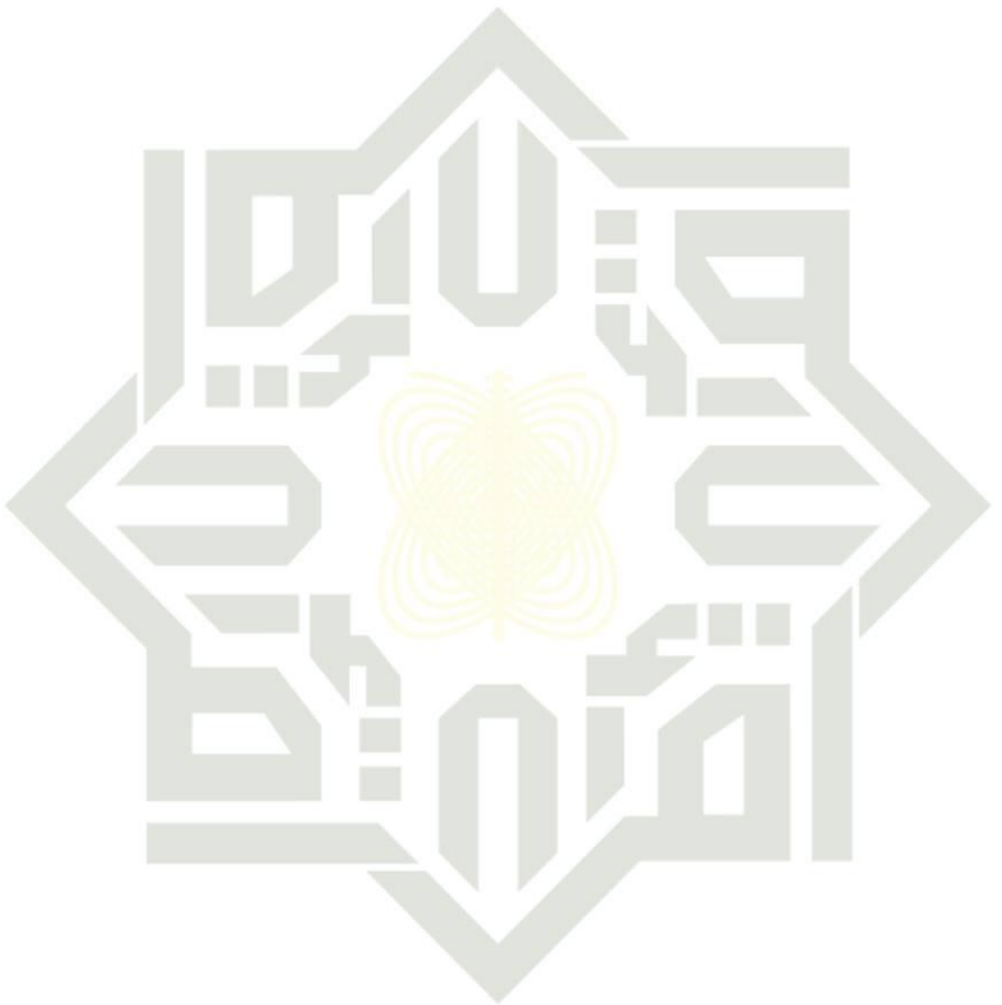
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

4.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah yang di hadapi pimpinan dalam menjalankan sebuah instansi baik swasta maupun pemerintahan menjadi semakin kompleks dan semakin sulit untuk dikerjakan sendiri. Salah satu contoh dari masalah yang sering di hadapi setiap instansi pemerintahan adalah cara pengelolaan kas yang aman. Maka peranan akuntansi dibutuhkan untuk menjalankan tata kelola yang baik. Akuntansi didefinisikan sebagai seni untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, mencatat dan menghasilkan laporan. Untuk menghasilkan laporan tersebut maka dibutuhkan pengendalian dan pengawasan agar laporan tersebut menjadi akurat.

Pada Instansi Pemerintahan, Laporan Keuangan yang disajikan harus berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 yang menjelaskan tentang unsur-unsur Sistem pengendalian pemerintah salah satunya yaitu pendelegasian wewenang dan pemisahan tugas yang tepat. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien Menteri/Pimpinan Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Fungsi pengendalian dilakukan oleh Kepala Daerah melalui Sistem Pengendalian Intern. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (PP RI Nomor 71 Tahun 2010).

Kas merupakan harta yang paling lancar (liquid) yang paling mudah disembunyikan atau di hilangkan. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal kas perlu di susun dengan cermat, berhati-hati dan lengkap agar tidak terjadi kecurangan dan penyelewengan. Instansi pemerintahan membutuhkan suatu pengendalian yang cukup untuk menghindari segala bentuk penyelewengan yang akan merugikan.

Pengamanan aset negara menjadi perhatian penting pemerintah dan masyarakat karena kelalaian dalam pengamanan aset akan berakibat pada mudahnya terjadi pencurian, penggelapan dan bentuk manipulasi lainnya. Kejadian terhadap aset tersebut dapat merugikan instansi pemerintah yang pada gilirannya akan merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa. Untuk itu, diperlukan adanya pengendalian internal guna mencegah terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan kas.

Pengendalian dapat diartikan sebagai alat untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dari instansi pemerintahan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk memudahkan pelaksanaan pengendalian instansi tersebut, instansi menyusun suatu sistem pengendalian internal yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memadai. Pengendalian Kas berfungsi untuk menciptakan prosedur-prosedur akuntansi yang dapat mencegah timbulnya penyelewengan, penggelapan, pemborosan terhadap harta kekayaan instansi, atau praktek - praktek lain yang dapat merugikan instansi tersebut.

Untuk menciptakan pengendalian intern yang baik, pemerintah harus menetapkan tanggung jawab secara jelas dan tiap orang memiliki tanggung jawab untuk tugas yang diberikan padanya. Apabila perumusan tanggung jawab tidak jelas dan terjadi suatu kesalahan, maka akan sulit untuk mencari siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Untuk mengawasi pengeluaran kas, maka diperlukan pengendalian intern yang baik terhadap kas yang memerlukan prosedur-prosedur yang memadai untuk melindungi pengeluaran kas.

Prosedur-prosedur yang digunakan untuk mengawasi kas, bisa berbeda-beda antara lembaga yang satu dengan lembaga lainnya. Hal ini tergantung pada berbagai faktor, seperti besarnya lembaga pemerintahan, jumlah karyawan, sumber-sumber kas, dan sebagainya.

Dengan perencanaan dan pengendalian yang baik, diharapkan harta serta data akuntansi milik instansi tersebut akan terlindungi, usaha efisiensi instansi tersebut meningkat dan terjamin keandalannya, serta garis kebijaksanaan manajemen akan dipatuhi oleh setiap pegawai. Berdasarkan landasan pikiran di atas, maka dalam tugas akhir ini penulis mengambil judul ***“Sistem Pengendalian Internal Kas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Provinsi Riau”***.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul yang diambil, maka permasalahan yang akan penulis bahas dalam tugas akhir ini adalah apakah pengendalian kas dalam kantor tersebut sudah secara efektif atau belum. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk membahas pengendalian kas di kantor BAPPEDALITBANG yaitu :
“Bagaimanakah sistem pengendalian internal kas yang di terapkan di kantor badan perencanaan pembangunan daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Provinsi Riau” ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal kas yang di terapkan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembang Provinsi Riau dan untuk mengetahui apakah sistem yang diterapkan tersebut sudah berjalan dengan efektif.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah

1. Bagi penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang sistem pengendalian internal kas yang di lakukan oleh instansi pemerintah tersebut

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi instansi terkait untuk memperbaiki sistem pengendalian yang akan berguna untuk membuat kebijakan yang terdapat dalam mengambil keputusan yang tepat dimasa mendatang.

3. Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan, tambahan informasi, dan arah untuk meneliti selanjutnya, khususnya terhadap sistem pengendalian internal kas

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan oleh penulis bertempat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau di Jl. Gajah Mada, Pekanbaru.

1.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian dimulai dari bulan Maret 2020 s.d April 2020

1.4.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

1. Data Primer

Data yang langsung penulis peroleh dari objek penelitian berupa penelitian berupa wawancara langsung mengenai prosedur pengendalian internal kas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data yang sudah diolah dan disajikan oleh kantor pemerintahan yang sudah jadi seperti struktur organisasi, deskripsi jabatan dan pembagian masing-masing tugas.

1.5 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan cara mewawancarai Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan tugas akhir.

2. Dokumentasi

Yaitu dengan mengutip data secara langsung yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis menggunakan sistem penulisan yang terbagi dalam 4 bab yang setiap bab terdiri dari sub-sub bab sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

**: GAMBARAN UMUM BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN**

Pada bab ini penulis akan membahas sejarah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau, struktur organisasi, visi misi, dan uraian tugas struktural instansi.

BAB III

: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini penulis akan membahas tentang pengertian dari sistem pengendalian internal kas, tujuan dan fungsi dari pengendalian kas tersebut, unsur-unsur yang terdapat pada pengendalian kas tersebut, jenis-jenis pengendalian kas, prosedur penerimaan dan pengeluaran kas dan sistem pengendalian internal kas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau

BAB IV

: KESIMPULAN

Bab ini penulis akan menjabarkan kesimpulan dari penjelasan penjelasan sebelumnya.

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG) PROVINSI RIAU

2.1 Sejarah Singkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu badan yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai suatu usaha untuk menjamin lajunya perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah. Landasan dasar dan Kronologi pembentukan kelembagaan Bappeda Provinsi Riau dan personil adalah sebagai berikut : Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1974 tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 142 Tahun 1974 tentang susunana Organisasi dan Tata Kerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Riau Nomor Kpts 94/VII/75 tentang pembentukan badan perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat 1 Riau, Tanggal 23 Juli 1975, ditanda tangani oleh Gubernur Riau Arifin Ahmad Ketua Bappeda Tingkat 1 Riau pertama kali dijabat oleh Bapak Drs. Rivaie Rachman dengan jumlah personil 25 orang yang terdiri unsur Setwilda Tingkat 1, Perguruan Tinggi dan Dinas Instansi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengangkatan Pegawai Bappeda sebanyak 14 orang pada tahun 1976
4. Kantor Bappeda menumpang di Gedung kantor BUCD (Badan Urusan Cees Daerah) Jalan Cut Nyak Dien Pada Tanggal 15 Juli 1976
5. Kepres No.27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Bappeda dan Mencabut Kepres No.15 1974
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.183 Tahun 1980 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Tingkat I dan II
7. Peraturan Daerah No.3 Tahun 1983 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Tingkat I Riau
8. Surat Keputusan Gubernur Riau Tanggal 29 Mei 1985 Tentang Personil Bappeda Dari Unsur Perguruan tinggi dan Pemda
9. Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Riau No.Kpts 638/IX/1992 Tanggal 24 September 1992, Tentang Pengembalian Pegawai Negeri Sipil/ Dosen Dari Universitas Riau Yang Bekerja Pada Bappeda Tingkat I Riau
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 21 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau No.8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

2.2 Visi dan Misi Badan perencanaan pembangunan Daerah provinsi Riau

Visi Bappeda sesuai RENSTRA Bappeda Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 yaitu :

"Mewujudkan Rencana Pembangunan Provinsi Riau Yang Berkualitas melalui Lembaga Perencana yang Profesional dan Berintegritas"

Adapun Penjabaran dari visi tersebut yaitu:

1. Berkualitas adalah tersusunnya rencana pembangunan yang dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan kebutuhan lokal atau akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, mendukung tercapainya tujuan pembangun
2. Profesional menggambarkan kinerja yang berorientasi pada hasil dan dengan menjaga kaidah-kaidah-kaidah proses dalam sebuah kerangka organisasi perencanaan yang modern
3. Integritas menunjukkan sebuah sikap yang berpegang teguh pada nilai-nilai yang benar dan teguh sikap yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pelayanan publik.

Adapun Misi Bappeda yaitu :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
2. Meningkatkan kompetensi aparatur perencana serta kapasitas kelembagaan menuju lembaga perencana yang profesional
3. Peningkatan pengelolaan data perencanaan yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Tugas dan Fungsi

Tugas:

Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Riau No.8 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, Bappeda mempunyai tugas pokok :

- 1) Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penataan ruang (wilayah)
- 2) Menyusun rencana umum tata ruang daerah (wilayah) RTRW dan melakukan pengamatan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan di lapangan.
- 3) Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan, menyerasikan, mengkoreksi, dan justifikasi usulan rencana kegiatan program yang diusulkan oleh SKPD Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota sebelum menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga tersusun KUA-PPAS dan menjadi RAPBD.
- 4) Bersama dengan tim anggaran Pemerintah Provinsi Riau mengkoordinir Penyusunan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Riau.
- 5) Menyusun dan Mengevaluasi RPJP,RPJM (daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Mengevaluasi Renstra – SKPD yang ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disesuaikan dengan RPJM Daerah.
- 7) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap program/ kegiatan dari SKPD yang sudah dan akan dilaksanakan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN dan sumber lain yang tidak mengikat serta menyampaikan laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis khusus di bidang pembangunan dan tata ruang.
- 9) Bersama tim menyusun laporan pertanggungjawaban tahunan dan akhir jabatan Gubernur Riau di bidang perencanaan dan pembangunan daerah.
- 10) Mengkoordinir dalam rangka perencanaan kegiatan pembangunan antar daerah, wilayah dan kerjasama luar negeri.

Fungsi :

Adapun beberapa fungsi kerja BAPPEDA adalah:

1. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
2. Pengambilan keputusan
3. Perencanaan pembangunan dan statistic
4. Pengorganisasian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pelayanan umum dan teknis perencanaan pembangunan dan statistik serta tata ruang
6. Pengendalian, pengarahan, pembinaan dan pembimbingan di bidang perencanaan pembangunan, statistik dan tata ruang.
7. Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi
8. Pelaksanaan rencana kerja
9. Pembiayaan
10. Penelitian, pengkajian dan survey menyangkut kebijakan perencanaan pembangunan.
11. Pelaporan dan evaluasi sesuai dengan tupoksi.

Gambar 2.4
Struktur Organisasi

PETA JABATAN BAPPEDALITBANG PROVINSI RIAU

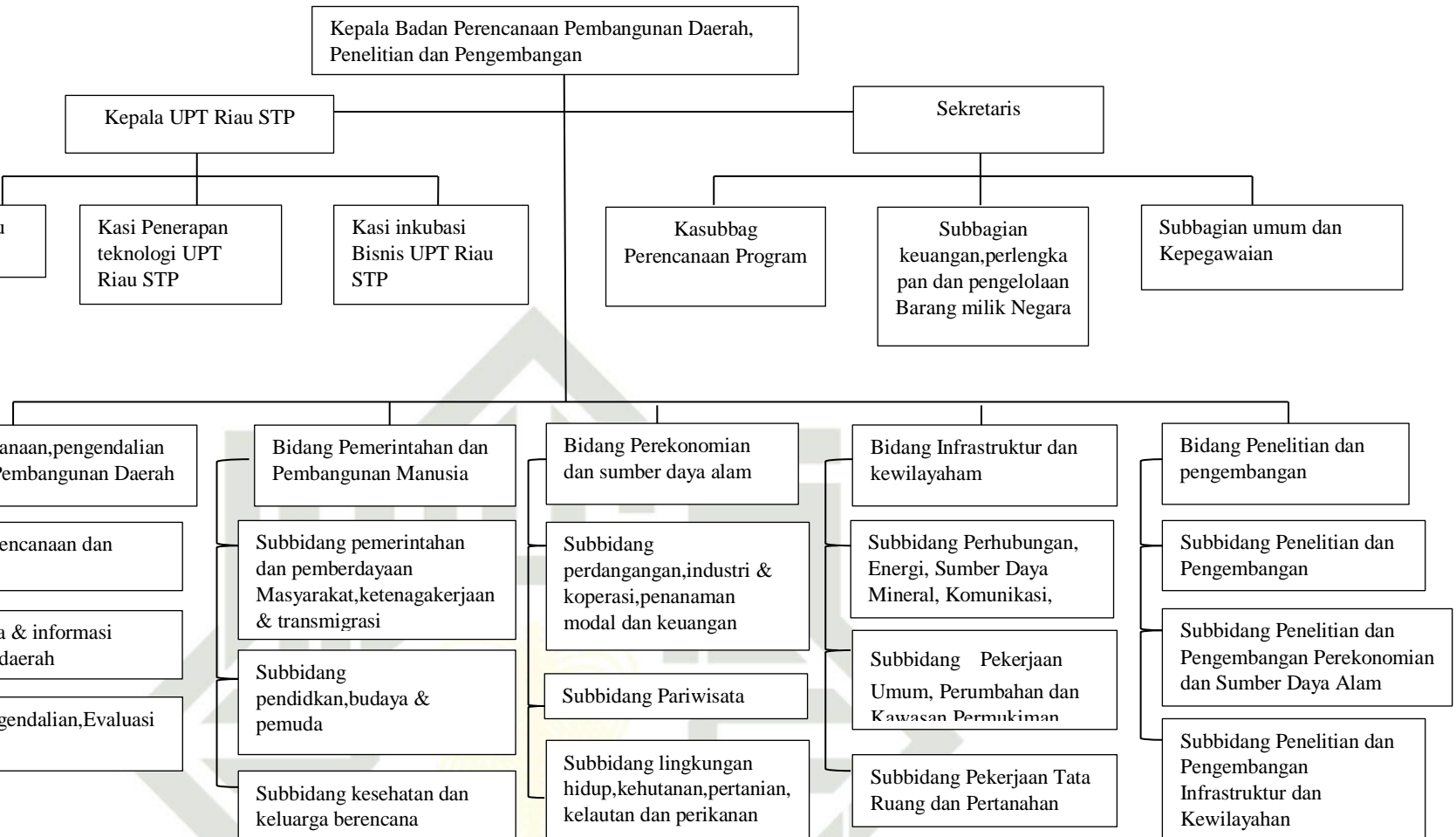
© Hak cipta
UIN Su

ng-Undang

State Islamic Univ

State Islamic Univ

1. Hak Cipta Dilindungi
a. Dilarang mengu
b. Penelitian ha
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanp



(sumber: Website Bappeda Provinsi Riau)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Uraian Tugas (*Job description*) Bagian/ Unit Kerja

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Riau memiliki beberapa bidang /unit kerja, yaitu :

2.5.1 Bidang Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan Perencanaan Program, Keuangan dan Perlengkapan, Kepegawaian dan Umum meliputi ketatausahaan, organisasi ketatalaksanaan, kehumasan, hukum, evaluasi dan pelaporan, serta koordinasi pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
2. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada kepala Dinas; Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang sekretariat terdiri atas :

a) Subbidang Umum dan Kepegawaian

Subbidang Umum dan Kepegawaian memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat.
- d. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian.
- e. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan (ANJAB), Analisa Beban Kerja (ABK), peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan.

b) Subbidang Keuangan dan Perlengkapan

Subbidang Keuangan dan Perlengkapan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai.
- d. Melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset.
- e. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan.

c) Subbidang Perencanaan Program

Subbidang Perencanaan Program memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program.
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program.
- c. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Perencanaan Program.
- d. Menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang.
- e. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) unit kerja.
- f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan nasional serta rapat koordinasi teknis.
- h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program.
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

2.5.2 Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Subbidang Perencanaan Makro, Subbidang Perencanaan Pembangunan dan Subbidang Pengendalian dan Evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada kepala Badan;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :

a) Subbidang Perencanaan Makro

Kepala subbidang perencanaan makro mempunyai tugas :

- a. Merencanakan kegiatan pada Subbidang Perencanaan Makro.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Perencanaan Makro.
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah.
- d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melaksanakan koordinasi pengidentifikasian permasalahan perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan.

b) Subbidang Perencanaan Pembangunan

Kepala Subbidang Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas :

1. Merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada Subbidang Perencanaan Pembangunan.
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Perencanaan Pembangunan.
3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan.
4. Melaksanakan koordinasi pengidentifikasian permasalahan perencanaan pembangunan tahunan berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan.
5. Melaksanakan analisa dan pengkajian perencanaan pembangunan tahunan.
6. Melaksanakan koordinasi pengintegrasian dan harmonisasi arah, kebijakan dan program pembangunan tahunan.
7. Melaksanakan koordinasi pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Melaksanakan koordinasi evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan.
9. Melaksanakan koordinasi penyusunan pagu indikatif perencanaan pembangunan tahunan.
10. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan.
11. Melaksanakan koordinasi verifikasi dokumen rencana kerja perangkat daerah;
12. Melakukan koordinasi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan kabupaten/kota.
13. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut.
14. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Perencanaan Pembangunan.
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

c) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi

Subbidang Pengendalian dan Evaluasi memiliki tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada Subbidang Pengendalian dan Evaluasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengendalian dan Evaluasi.
3. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan provinsi dan kabupaten/kota.
4. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan provinsi dan kabupaten/kota.
5. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan provinsi dan kabupaten/kota.

2.5.3 Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Subbidang Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Ketenagakerjaan dan Subbidang Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
2. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada kepala Badan.
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri atas:

a) Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
4. Melaksanakan analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5. Melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
6. Melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
7. Melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan Perangkat Daerah urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

8. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan Kementerian/Lembaga urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
9. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

b) Subbidang Pendidikan, Budaya, Pemuda Dan Ketenagakerjaan

Kepala Subbidang Pendidikan, Budaya, Pemuda Dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas :

1. Merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada Subbidang Pendidikan, Budaya, Pemuda Dan Ketenagakerjaan.
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pendidikan, Budaya, Pemuda Dan Ketenagakerjaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan.
4. Melaksanakan analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan
5. Melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan.
6. Melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan
7. Melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan Perangkat Daerah urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan
8. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan Kementerian/Lembaga urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pendidikan, Budaya, Pemuda Dan Ketenagakerjaan.
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

c) Subbidang Kesehatan dan Keluarga Berencana

Kepala Subbidang Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas :

1. Merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada Subbidang Kesehatan dan Keluarga Berencana.
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Kesehatan dan Keluarga Berencana.
3. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Melaksanakan analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan Kesehatan, Pengendalian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

5. Melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Melaksanakan fasilitasi teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
7. Melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan Perangkat Daerah urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
8. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan Kementerian/Lembaga urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
9. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Kesehatan dan Keluarga Berencana.
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.4 Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam,

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Subbidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan, Subbidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata dan Sumber Daya Mineral serta Subbidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
2. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada kepala Badan.
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apapun Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri atas :

a) Subbidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan

Kepala Subbidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan mempunyai tugas :

1. Merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada Subbidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan.
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan.
3. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Industri, Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan.
4. Melaksanakan analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan Industri, Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan.
5. Melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahunan urusan Industri, Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan.

b) Subbidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata dan Sumber Daya Mineral

Kepala Subbidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas :

1. Merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada Subbidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata dan Sumber Daya Mineral.
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata dan Sumber Daya Mineral.
3. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata dan Sumber Daya Mineral.
4. Melaksanakan analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata dan Sumber Daya Mineral.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Subbidang pertanian, Kelautan dan Perikanan

Kepala Subbidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas :

1. Merencanakan kegiatan pada Subbidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan.
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan.
3. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan.
4. Melaksanakan analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan.
5. Melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.5 Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Subbidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi dan Informasi, Subbidang Perumahan, Permukiman dan Transmigrasi dan Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
2. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada kepala Badan.
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri atas :

a) Subbidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi, Informasi dan Persandian

Kepala Subbidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi, Informasi dan Persandian mempunyai tugas :

1. Merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada Subbidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi, Informasi dan Persandian.
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi, Informasi dan Persandian.
3. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi, Informasi dan Persandian.
4. Melaksanakan analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi, Informasi dan Persandian.
5. Melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahunan urusan Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi, Informasi dan Persandian.

b) Subbidang Perumahan, Permukiman dan Transmigrasi

Kepala Subbidang Perumahan, Permukiman dan Transmigrasi mempunyai tugas :

1. Merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada Subbidang Perumahan, Permukiman dan Transmigrasi.
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Perumahan, Permukiman dan Transmigrasi.
3. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Transmigrasi.
4. Melaksanakan analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Transmigrasi.
5. Melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahunan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Transmigrasi.

c) Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang

Kepala Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang mempunyai tugas :

1. Merencanakan dan penganggaran program/kegiatan pada Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang.
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang.
3. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pertanahan dan Penataan Ruang.
4. Melaksanakan analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan Pertanahan dan Penataan Ruang.
5. Melaksanakan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan urusan Pertanahan dan Penataan Ruang.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dalam suatu perusahaan maupun instansi
2. Pengendalian internal adalah prosedur dan proses yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan
3. Tujuan pengendalian internal adalah Menjaga keamanan harta milik suatu organisasi Manajemen memerlukan informasi yang teliti dapat dipercaya dan tepat pada waktunya untuk mengolah kegiatan-kegiatan perusahaan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan pengembangan (BAPPEDALITBANG) Provinsi Riau memiliki sistem pengendalian kas yang yang efektif karena terdapat pemisahan tugas dalam pencatatan dan tanggung jawab sesuai dengan unsur-unsur pengendalian yang baik. Dalam pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas, telah berjalan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada. Setiap transaksi pengeluaran kas ditinjau langsung oleh pimpinan Instansi agar tidak terjadi kecurangan dan setiap pengeluaran Kas diotorisasi oleh pihak yang berwenang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan saran agar bermanfaat bagi Sistem pengendalian internal kas pada BAPPEDALITBANG yaitu Sebaiknya rekonsiliasi bank perlu dilakukan oleh Instansi itu sendiri, tidak hanya dilakukan dari pihak lain. Agar untuk mengetahui kesesuaian pencatatan saldo kas yang ada di Bank dengan catatan yang ada di buku kas umum Instansi dan jika mengalami perbedaan saldo, instansi dapat turun langsung dalam mengatasi masalah tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Surah Al-Mujadilah Ayat 7
- Al-Qur'an Surah Al-Ashr Ayat 3
- Al-Qur'an Surah Al-Balad Ayat 7
- Sari Retna Ati, Delia Nurbatin dan Supami wahyu Setiyowati. 2017. *Akuntansi Keuangan berbasis PSAK*. Bogor: MitraWacanaMedia.
- Mulyadi. 2016. *sistem akuntansi*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Warren, Carl S, Reeve, James M, dkk. 2014. Pengantar Akuntansi-Adaptasi Indonesia. Edisi 25. Terjemahan Novrys Suhardianto, Devi S. Kalanjati. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2011. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Diana Anastasia dan Lilis Setiawati. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: ANDI.
- Reeve, James M., Carl S. Warren, Jonathan E. Duchac, Ersi Tri Wahyuni, Gatot Soepriyanto, Amir Abadi Jusuf, Chaerul D. Djakman, 2009. *Pengantar Akuntansi, Buku 1*, Jakarta: Salemba Empat.
- Suhayati, Ely dan Anggadini, Sri D. 2009. *Akuntansi Keuangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 2012. Jakarta: Salemba.
- Katikahadi Hans, Rosita Uli Sinaga, et all. 2019. *Akuntansi Keuangan I berdasarkan SAK berbasis IIFRS*. Edisi kedua. Jakarta: IAI
- Rudianto. 2012. Pengantar Akuntansi. Jakarta: Erlangga.
- Taamam, Syaifudin. 2019. Standar Kerja Pengawasan intern Badan pengawasan keuangandanpembangunan. <http://www.bpkp.go.id/uu/file/4/143.bpkp>. (diakses bulan Maret)
- Harison Jr., Walter T., et all. 2012. *Akuntansi Keuangan IFRS Edisi Kedelapan Jilid 1*. Jakarta: Erlangga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- M. Reeve James, dkk. 2013. *Pengantar Akuntansi*, Buku I. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Jakarta: Salemba Empat.
- Sulawati, Dwi Seftihani Riana. 2014. Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Anteseden Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dosen STIE STEMBI – Bandung Business School, Vol XI, No. 1, 15-32.
- Mulyadi. 2017. *Sistem Akuntansi*. Edisi empat. Jakarta: Salemba Empat
- Vicky F. 2018. *Analisis sistem pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran Kas*. Dipublikasikan. Skripsi. Program Studi Akuntansi Syariah. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

Jl. Sekeloa Tengah No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 Pekanbaru, Riau 20134 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id E-mail: tekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/550/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Izin Penelitian**

Pekanbaru, 27 Januari 2020 M
1 Jumadil Akhir 1441 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Chelsi Nizara O.K
NIM. : 01770423562
Jurusan : D-III Akuntansi
Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Sistem Pengendalian Internal Kas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG) PROVINSI RIAU

Sistem Akuntansi penerimaan kas

1. Dari mana sumber penerimaan kas pada bappeda?
2. Apa saja fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penerimaan kas
3. Bagaimana prosedur atau alur pengendalian dalam penerimaan kas?
4. Bagaimana unsur pengendalian intern pada sistem akuntansi penerimaan kas pada bappeda?

Sistem Akuntansi pengeluaran kas

1. Apa saja kegiatan operasional yg dapat menyebabkan terjadinya pengeluaran kas
2. Apa saja fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas
3. Bagaimana Prosedur atau alur pengendalian dalam pengeluaran kas
4. Bagaimana unsur pengendalian internal pada sistem akuntansi pengeluaran kas pada bappeda?

Efektivitas sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas

1. Berapa jumlah penerimaan kas pertahun?
2. Berapa jumlah pengeluaran kas pertahun?
3. Apakah pembagian wewenang sudah berjalan cukup baik ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2020

nisasi : 3.00.01.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
2	3	4			5			6			7		
PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.800.000,00	-	-	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
Retribusi Daerah	4.800.000,00	-	-	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
Retribusi Jasa Usaha	4.800.000,00	-	-	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.800.000,00	-	-	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
Apapun per Bulan	4.800.000,00	-	-	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
Apapun per Triwulan	4.800.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00			1.200.000,00			1.200.000,00		

Pekanbaru, 02 Januari 2020

Pengguna Anggaran

PURNAMA IRAWANSYAH, S.Hut. MM

NIP. 19700521 199403 1 008

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2020

no gaji pegawai

asasi : 3.00.01.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
2	3	4			5			6			7		
BELANJA TIDAK LANGSUNG	42.867.335.484,10	3.572.277.957,01	3.572.277.957,01	3.572.277.957,01	3.572.277.957,01	3.572.277.957,01	3.572.277.957,01	3.572.277.957,01	3.572.277.957,01	3.572.277.957,01	3.572.277.957,01	3.572.277.957,01	3.572.277.957,01
Belanja Pegawai	42.867.335.484,10	3.572.277.957,01	3.572.277.957,01	3.572.277.957,01	3.572.277.957,01	3.572.277.957,01	3.572.277.957,01	3.572.277.957,01	3.572.277.957,01	3.572.277.957,01	3.572.277.957,01	3.572.277.957,01	3.572.277.957,01
Belanja Gaji dan Tunjangan	16.997.292.614,10	1.416.441.051,17	1.416.441.051,17	1.416.441.051,17	1.416.441.051,17	1.416.441.051,17	1.416.441.051,17	1.416.441.051,17	1.416.441.051,17	1.416.441.051,17	1.416.441.051,17	1.416.441.051,17	1.416.441.051,17
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	12.468.349.344,10	1.039.029.112,01	1.039.029.112,01	1.039.029.112,01	1.039.029.112,01	1.039.029.112,01	1.039.029.112,01	1.039.029.112,01	1.039.029.112,01	1.039.029.112,01	1.039.029.112,01	1.039.029.112,01	1.039.029.112,01
Tunjangan Keluarga	1.840.183.016,00	153.348.584,67	153.348.584,67	153.348.584,67	153.348.584,67	153.348.584,67	153.348.584,67	153.348.584,67	153.348.584,67	153.348.584,67	153.348.584,67	153.348.584,67	153.348.584,67
Tunjangan Jabatan	297.420.000,00	24.785.000,00	24.785.000,00	24.785.000,00	24.785.000,00	24.785.000,00	24.785.000,00	24.785.000,00	24.785.000,00	24.785.000,00	24.785.000,00	24.785.000,00	24.785.000,00
Tunjangan Fungsional	889.150.000,00	74.095.833,33	74.095.833,33	74.095.833,33	74.095.833,33	74.095.833,33	74.095.833,33	74.095.833,33	74.095.833,33	74.095.833,33	74.095.833,33	74.095.833,33	74.095.833,33
Tunjangan Fungsional Umum	539.460.000,00	44.955.000,00	44.955.000,00	44.955.000,00	44.955.000,00	44.955.000,00	44.955.000,00	44.955.000,00	44.955.000,00	44.955.000,00	44.955.000,00	44.955.000,00	44.955.000,00
Tunjangan Beras	496.352.800,00	41.362.733,33	41.362.733,33	41.362.733,33	41.362.733,33	41.362.733,33	41.362.733,33	41.362.733,33	41.362.733,33	41.362.733,33	41.362.733,33	41.362.733,33	41.362.733,33
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	201.530.000,00	16.794.166,67	16.794.166,67	16.794.166,67	16.794.166,67	16.794.166,67	16.794.166,67	16.794.166,67	16.794.166,67	16.794.166,67	16.794.166,67	16.794.166,67	16.794.166,67
Pembulatan Gaji	1.286.510,00	107.209,17	107.209,17	107.209,17	107.209,17	107.209,17	107.209,17	107.209,17	107.209,17	107.209,17	107.209,17	107.209,17	107.209,17
Iuran BPJS Kesehatan	263.560.944,00	21.963.412,00	21.963.412,00	21.963.412,00	21.963.412,00	21.963.412,00	21.963.412,00	21.963.412,00	21.963.412,00	21.963.412,00	21.963.412,00	21.963.412,00	21.963.412,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	25.870.042.870,00	2.155.836.905,83	2.155.836.905,83	2.155.836.905,83	2.155.836.905,83	2.155.836.905,83	2.155.836.905,83	2.155.836.905,83	2.155.836.905,83	2.155.836.905,83	2.155.836.905,83	2.155.836.905,83	2.155.836.905,83
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	25.870.042.870,00	2.155.836.905,83	2.155.836.905,83	2.155.836.905,83	2.155.836.905,83	2.155.836.905,83	2.155.836.905,83	2.155.836.905,83	2.155.836.905,83	2.155.836.905,83	2.155.836.905,83	2.155.836.905,83	2.155.836.905,83
Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Pengeluaran per Bulan	42.867.335.484,10	3.572.277.957,01	3.572.277.957,01	3.572.277.957,01	3.572.277.957,01	3.572.277.957,01	3.572.277.957,01	3.572.277.957,01	3.572.277.957,01	3.572.277.957,01	3.572.277.957,01	3.572.277.957,01	3.572.277.957,01
Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Pengeluaran per Triwulan	42.867.335.484,10	10.716.833.871,02			10.716.833.871,02			10.716.833.871,02			10.716.833.871,02		

Pekanbaru, 02 Januari 2020

Pengguna Anggaran

ZUHRIN

NIP. 196408282007011005

BL

SUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2020

SKPD : 3.00.01.01.- BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PEN

Belanja yg menunjang program kegiatan pemerintah / operasional kantor.

Hal 1 dari 4

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU
1	2	3
3.00.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.577.670.000,00
3.00.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	46.400.000,00
3.00.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.001.000.000,00
3.00.01.01.003.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	505.000.000,00
3.00.01.01.004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.080.730.000,00
3.00.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	374.000.000,00
3.00.01.01.007.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	180.000.000,00
3.00.01.01.008.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	450.000.000,00
3.00.01.01.009.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	250.000.000,00
3.00.01.01.010.	Penyediaan Makan dan Minuman	750.000.000,00
3.00.01.01.011.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	2.550.000.000,00
3.00.01.01.012.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	1.922.540.000,00
3.00.01.01.013.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	968.000.000,00
3.00.01.01.034.	Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi dan kehumasan SKPD	300.000.000,00
3.00.01.01.035.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000,00
3.00.01.02.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1.981.620.700,00
3.00.01.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	315.000.000,00
3.00.01.02.013.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	173.250.000,00
3.00.01.02.014.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	351.000.000,00
3.00.01.02.019.	Pengadaan Mebeleur	116.000.000,00
3.00.01.02.020.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	147.283.600,00

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU
1	2	3
3.00.01.02.021.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Rumah Jabatan/Dinas	125.000.000,00
3.00.01.02.022.	Sarana dan Prasarana Kearsipan	150.000.000,00
3.00.01.02.025.	Pengelolaan Kawasan UPT. Riau Science Techno Park	604.087.100,00
3.00.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.104.000.000,00
3.00.01.03.001.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	391.000.000,00
3.00.01.03.003.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	713.000.000,00
3.00.01.15.	Pengembangan Data/Informasi Pembangunan Daerah	1.364.742.000,00
3.00.01.15.001.	Pengelolaan Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau	355.000.000,00
3.00.01.15.002.	Pengelolaan Website Bappeda Provinsi Riau	100.000.000,00
3.00.01.15.003.	Pengelolaan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Provinsi Riau	197.142.000,00
3.00.01.15.004.	Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Provinsi Riau	162.600.000,00
3.00.01.15.005.	Penerbitan Majalah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau	200.000.000,00
3.00.01.15.006.	Peningkatan Jaringan Intranet di Bappeda Provinsi Riau	350.000.000,00
3.00.01.16.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	8.530.509.840,00
3.00.01.16.001.	Penyusunan RKPD Provinsi Riau	528.000.000,00
3.00.01.16.002.	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	825.000.000,00
3.00.01.16.003.	Pengendalian, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Asistensi Evaluasi dan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau	546.106.000,00
3.00.01.16.008.	KLHS Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Riau	0,00
3.00.01.16.009.	Penyusunan Perubahan Dokumen RPJMD	0,00
3.00.01.16.016.	Penyiapan Materi/paparan/makalah Pimpinan Terkait Perencanaan	100.000.000,00
3.00.01.16.017.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Sumber Daya Alam	640.000.000,00
3.00.01.16.018.	Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Riau	360.000.000,00
3.00.01.16.019.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Monitoring Evaluasi SDGs	332.187.440,00

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU
1	2	3
3.00.01.16.020.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	810.000.000,00
3.00.01.16.021.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi RAD Pangan dan Gizi Provinsi Riau	315.000.000,00
3.00.01.16.022.	Koordinasi dan Monitoring Rencana Aksi Nasional Urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Riau	480.000.000,00
3.00.01.16.023.	Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.775.000.000,00
3.00.01.16.024.	Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian Rencana Tata Ruang Provinsi Riau	250.000.000,00
3.00.01.16.025.	Penyusunan Dokumen Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Riau	240.000.000,00
3.00.01.16.026.	Sinkronisasi dan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	346.500.000,00
3.00.01.16.027.	Asistensi dan Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	0,00
3.00.01.16.028.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	880.000.000,00
3.00.01.16.029.	Verifikasi, Analisis, dan Penyelarasan Dokumen Perencanaan RPJP dan RPJMD Kabupaten/Kota	102.716.400,00
3.00.01.16.030.	Musrenbang Perubahan RPJMD Provinsi Riau	0,00
3.00.01.16.031.	Penetapan dan Sosialisasi Perubahan RPJMD Provinsi Riau	0,00
3.00.01.17.	Program Penelitian, Pengembangan Dan Kerjasama Pembangunan	3.899.232.180,00
3.00.01.17.001.	Inkubasi Tenant Inkubator se-Provinsi Riau	349.232.180,00
3.00.01.17.009.	Pilot Project Teknologi Biofuel Sebagai Sumber Bahan Bakar Khusus Di Provinsi Riau	0,00
3.00.01.17.058.	Peningkatan Kerjasama Fasilitas dan Fungsi Cagar Biosfer Giam Kecil Bukit Batu	200.000.000,00
3.00.01.17.059.	Kerjasama Pembangunan Antar Daerah dan Dunia Usaha/Lembaga	750.000.000,00
3.00.01.17.060.	Peningkatan dan Pengembangan Kerjasama Pembangunan Antar Negara	350.000.000,00
3.00.01.17.061.	Forum Kerjasama Gubernur se-Sumatera	1.500.000.000,00
3.00.01.17.062.	Penyusunan arah kerjasama pembangunan daerah SIAP BEDELAU	750.000.000,00

Total Pagu Kegiatan	27.457.774.720,00
---------------------	-------------------

Pekanbaru, 4 Maret 2020
GUBERNUR RIAU

SYAMSUAR

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Chelsi Nizara O.K, di lahirkan di Pekanbaru 04 April 1999. Ayahanda bernama O.K Nirwana dan Ibunda bernama Ratna. Penulis anak peertama dari dua bersaudara.

Jenjang Pendidikan dimulai dari TK As-syakirin pokoknya Tahun Ajaran 2004-2005, kemudian tahun 2005 penulis melanjutkan pendidikan di SDN 007 dan lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 17 Kota Pekanbaru dari tahun 2011-2014, dan melanjutkan pendidikan di SMA Handayani Kota Pekanbaru dari 2014-2017. Kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan D3 Akuntansi.

Dengan berkat Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan Judul “ **Sistem Pengendalian Internal Kas Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Provinsi Riau** ” dibawah bimbingan Ibuk Rimet, SE, MM, CA dan pada tanggal 19 Mei 2020 dipanggil untuk mengikuti ujian mhaqasah dan dinyatakan lulus dengan nilai Sangat Memuaskan dan menyandang gelar Ahli Madya (A.Md).